

ANALISIS DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Jouzar Farouq Ishak¹⁾, Lokita Rizky Megawati²⁾ dan Achmad Fadillah³⁾

¹Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Bandung Barat, 40012

^{2,3}Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran, Bogor, 16151

E-mail: jouzar.farouq@polban.ac.id

Abstract

Many regulations regarding the implementation of regional financial management have been issued. Regional financial independence is shown by local revenue compared to regional income from other sources such as central government assistance or loans. This research has a theoretical contribution in terms of providing additional empirical evidence and additional knowledge development about public sector accounting, especially regional financial independence. The population in this study were all- district/city governments in the province of Yogyakarta. Secondary data comes from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance which consists of data on Regional Original Revenue, Regional Revenue, and Regional Expenditure. The method of analysis used in this research is regression analysis. Regional income affects on regional financial independence. Another determinant of regional financial independence is regional spending. The findings in this study indicate that regional spending affects on regional financial independence. The district/city government in the Province of the Special Region of Yogyakarta must make efforts to increase the realized allocation for regional revenue and regional expenditure so that it can exceed the target set so that it can have implications for improving the welfare of the people themselves.

Keywords: *Regional Revenue; Regional Ependiture; Regional Financial Independence*

Abstrak

Aturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah banyak yang telah dikeluarkan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dalam hal memberikan tambahan bukti empiris dan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik khususnya kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Determinan lain yang menentukan kemandirian keuangan daerah adalah belanja daerah. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengupayakan agar alokasi realisasi untuk pendapatan daerah dan belanja daerah lebih ditingkatkan agar dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga bisa memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Kata Kunci: *Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Aturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah banyak yang telah dikeluarkan. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun aturan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan tersebut keluar setelah era reformasi dimana agenda reformasi adalah sistem pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah (Sari, 2015).

Tujuan otonomi daerah menurut Suseno (2013) pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Penerimaan pendapatan daerah telah diserahkan oleh pemerintah pusat agar daerah dapat menjalankan aktivitas daerahnya secara mandiri (Ariani & Putri, 2016). Selain pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh faktor lain, diantaranya dana bagi hasil dan dana alokasi umum (Periansya, 2019).

Perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi, yang berarti bahwa belanja daerahnya semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya. Rata-rata rasio pendapatan asli daerah provinsi menunjukkan tingkat kemandirian yang makin baik. Berikut ini adalah tabel kemandirian keuangan provinsi disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1
Kemandirian Keuangan Daerah

Daerah/Tahun	2016	2017	2018
DKI Jakarta	67%	66,4%	67,5%
Banten	39%	57,9%	59,7%
Jawa Barat	32%	54,1%	55%
Jawa Timur	28%	53,3%	54%
Jawa Tengah	25%	51%	53,2%
DI Yogyakarta	25%	33,2%	33,5%
Rata-rata Nasional	23%	33,9%	35,2%

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tabel 1. kemandirian keuangan daerah bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang tertinggi memiliki rasio kemandirian keuangan daerah selama 3 tahun berturut-turut dengan persentase sebesar 67%, 66,4%, dan 67,5%. Pada tahun 2016 rata-rata secara nasional sebesar 23%, Provinsi DI Yogyakarta rasio kemandirian keuangan daerah masih berada di atas rata-rata secara nasional namun pada tahun 2017 dan 2018 rata-rata rasio pendapatan asli daerah provinsi pada tahun 2017 33,9% dan tahun 2018 35,2%. Dalam hal lingkup tersebut, Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2017 dan 2018 memiliki rasio pendapatan asli daerah di bawah rata-rata rasio pendapatan asli daerah antar provinsi 33,2% dan 33,5%.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan dengan variabel pendukung seperti: pendapatan asli daerah (Andriani & Wahid, 2018); (Lestari, Dali, & Abdullah, 2016); (Nindita & Rahayu, 2018); pendapatan daerah (Hermanto, 2018), dana perimbangan (Andriani & Wahid, 2018); dan belanja modal (Ariani & Putri, 2016); (Imawan & Wahyudin, 2014); (Lestari et al., 2016); (Nindita & Rahayu, 2018). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga analisis determinan kemandirian keuangan daerah menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki kontribusi tambahan bukti empiris dan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik khususnya kemandirian keuangan daerah. Secara praktis, penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat pada pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran dan kebijakan dalam penentuan kemandirian keuangan daerah sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kekeliruan dalam mengambil kebijakan periode akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian karena sebagaimana Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa rasio pendapatan asli daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah rata-rata rasio pendapatan asli daerah secara nasional.

Dalam pengumpulan data, peneliti mengelompokkan jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dipilih adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah. Jika dilihat dari waktu pengumpulannya termasuk data *time series* yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi.

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen bersama-sama. Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian terdapat tiga konsep variabel yang akan diteliti yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komposisi pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Tahar & Zakhiya, 2011). Menurut Swandewi (2014) dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Menurut Adisasmita (2011) APBD merupakan suatu bentuk kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang

komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang.

Swandewi (2014) menyatakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kaunang, Naukoko, & Londa (2016) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Andriani & Wahid (2018) berpendapat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh setiap pemerintah kabupaten/kota. Menurut Imawan & Wahyudin (2014) kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian kenormalan nilai residual dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu dengan memperhatikan hasil nilai signifikansi (*sig.Z*) yang ada apakah lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig.Z*) untuk pendapatan daerah (0,593), belanja daerah (0,998) dan kemandirian keuangan daerah (0,337) nilai tersebut lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Bila uji F menghasilkan uji yang signifikan (*p-value* < 0,05) berarti asumsi linieritas terpenuhi. Hasil uji linieritas dari seluruh jalur memiliki nilai *p-value* (0,000) yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi linieritas memenuhi syarat.

Pada persamaan yang diolah diperoleh nilai R Square sebesar 0,931. Hasil perhitungan ketepatan model sebesar 93,1% menerangkan bahwa kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktural dari ketiga variabel yang diteliti adalah sebesar

93,1% dan sisanya sebesar 6,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terlibat dalam model.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Estimasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Beta	<i>p-value</i>
Pendapatan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	1,505	,000
Belanja Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	-,707	,000

Tabel 2. Ringkasan Hasil Estimasi menerangkan bahwa pengaruh yang paling kuat bersumber dari pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien 1,505. Hasil analisis ini menerangkan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah semakin tinggi akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga daerah tersebut dapat dideskripsikan memiliki tingkat kemampuan daerah untuk mendanai aktivitas pemerintah daerahnya sendiri yang berasal dari perolehan pendapatan daerahnya dan tidak bergantung pada pinjaman atau bantuan baik dari daerah lain maupun Pemerintah Pusat.

Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah merupakan dugaan yang pertama, dimana setelah dilakukan uji statistik maka dugaan ini diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Wahid (2018) bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Verawaty, Fransisca, & Rahmawati (2017) tentang analisis determinan tingkat kemandirian keuangan daerah bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Determinan lain yang menentukan kemandirian keuangan daerah adalah belanja daerah. Temuan pada penelitian ini menunjukkan dugaan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nindita & Rahayu (2018) serta Imawan & Wahyudin (2014) bahwa terdapat pengaruh negatif Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja modal dapat terpacu oleh kegiatan yang dilakukan dengan pembangunan dari daerah tersebut agar layanan publik dapat meningkat sehingga menimbulkan efek partisipasi dari masyarakat (Ariani & Putri, 2016).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan yaitu pertama, pendapatan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Perbandingan pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Kesimpulan kedua, belanja daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Agar lebih memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengupayakan agar alokasi realisasi untuk pendapatan daerah dan belanja daerah lebih ditingkatkan agar dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga bisa memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Keterbatasan penelitian adalah terbatas pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak bisa digeneralisasi ke semua Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pemangku kebijakan dan kepentingan dapat lebih berani mengambil resiko dengan fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat seperti belanja modal dan mengurangi anggaran seperti belanja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah. In *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper* (pp. 364–369).
- Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. In *Konferensi Regional Akuntansi V* (pp. 67–81). <https://doi.org/10.9744/jak.19.2.67-81>
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i2.4176>
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

- dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 44–55. <https://doi.org/10.33772/jpeb.v1i2.1801>
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah. *I-FINANCE*, 5(2), 165–180.
- Rusydi, B. U. (2015). Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008). *Iqtisaduna*, 1(2), 116–129.
- Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* (pp. 538–545).
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22. <https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22>
- Suseno, D. A. (2013). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1710>
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376.
- Tahar, A., & Zakhya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(3), 1–10.